

BAB II

Kebijakan pemerintah dalam memberikan Stimulus ekonomi terhadap (UMKM) terdampak pandemi covid-19

Perekonomian dunia saat ini sedang mengalami kemerosotan seperti ini pandemi virus Corona atau yang sering disinggung dengan Covid. Wuhan, China, merupakan lokasi pertama kali virus Corona ditemukan. Menurut Alodokter.com, Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini sangat mudah menyebar sehingga akan mengakibatkan angka kematian yang tinggi pada tahun 2018 dan 2020. Hampir setiap industri, tidak hanya kesehatan, terkena dampaknya. Pandemi virus corona juga berdampak signifikan terhadap perekonomian. IMF mencatat ekonomi dunia akan menghadapi keadaan darurat setelah sekitar 95% negara di planet ini diproyeksikan mengalami kompresi atau mengalami dampak buruk pembangunan ekonomi negatif. IMF mencatat bahwa pandemi virus Corona juga telah menyebabkan kerugian ekonomi global sebesar 12 triliun dolar AS, atau sekitar Rp 168.000 triliun (kurs Rp 14.000), menurut data Warta Ekonomi. Menurut Liputan6.com, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan minus dan negatif 4,4 persen hingga akhir tahun 2020. Akibatnya, banyak negara menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada Indonesia. Pada Maret 2020, kasus COVID-19 pertama teridentifikasi di Indonesia. Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia setelah mewabah. Berbagai taktik dilakukan, seperti himbuan protokol kesehatan, social distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan untuk sementara melarang turis asing masuk ke Indonesia. Kebijakan social distancing yang dipilih pemerintah Indonesia telah menghentikan produksi. Kebijakan Work From

Home telah diadopsi oleh sejumlah bisnis, dan yang lain telah mengambil keputusan untuk merumahkan karyawan secara massal.¹

Dalam pembahasan di bab kedua ini dalam Kebijakan pemerintah dalam memberikan Stimulus ekonomi terhadap (UMKM) terdampak pandemi covid-19 di sini akan dijelaskan pertumbuhan ekonomi global pasca covid-19, Perkembangan Perekonomian Pasca Pandemi Covid-19, dan Program Bantuan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).

A. Pertumbuhan Ekonomi Global Pasca Covid- 19

Prediksi pertumbuhan ekonomi global perlu dijadikan input bagi pemerintah dalam merancang kebijakan- kebijakan ekonomi terutama solusi bagi UMKM. Banyak sekali lembaga – lembaga ekonomi internasiona maupun sejumlah ahli ekonomi yang telah merilis dan memberikan prediksi mengkhawatirkan terkait pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020, seperti JP Morgan dengan prediksinya pertumbuhan ekonomi minus 1,1 persen, dan IMF dengan prediksinya minus 3 persen untuk pertumbuhan ekonomi global tahun 2020. Sementara dalam pertumbuhan perekonomian yang ada di negara Indonesia. IMF Meramal bahwasanya negara Indonesia masih akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan positif sebesar 6,5% dari target yang sudah ditentukan di awal sebesar 5% di tahun 2020. Sementara Menteri Keuangan dari Ibu Sri Mulyani juga memprediksikan bahwasanya pertumbuhan perekonomian negara Indonesia juga akan masih berkembang sekitar 0,3 sampai dengan 2,8% di tahun 2020 paska covid-19 ini. Pada angka- angka tersebut bisa kita simpulkan bahwa Sanya pada jumlah UMKM dan kontribusi serta Opini prediksi dalam pertumbuhan ekonomi global di Indonesia ini

¹ Dedu junaedi, “*Dampak pandemic covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara terdampak*”. (Jakarta: symposium nasional 2020),hlm.2-4

mendapatkan salah satu perhatian khusus yang cukup serius dan bisa menjadi salah satu acuan dalam evaluasi pada negara atau pemerintahan dalam merancang kebijakan- kebijakan terkait strategi yang tepat untuk eksistensi UMKM yang berada di negara Indonesia.²

Pada Situasi pandemi saat ini cukup memberikan tantangan yang berat sekaligus menjadi awal peluang bagi pemerintah dalam memunculkan eksistensi wirausaha UMKM baru. diartikan, perlu adanya solusi jangka pendek untuk membantu UMKM dan pekerja yang tergabung didalamnya. Dilanjutkan dengan solusi jangka panjang, apalagi jika dikaitkan dengan era industri 4.0 yang mensyaratkan ketersediaan teknologi digital untuk mendukung aktifitas ekonomi. Ada beberapa solusi jangka pendek untuk tetap menjaga eksistensi UMKM. Menurut OECD, beberapa solusi perlu dipertimbangkan untuk dilakukan yakni: protokol kesehatan ketat dalam menjalankan aktivitas ekonomi oleh UMKM, penundaan pembayaran hutang atau kredit untuk menjaga likuiditas keuangan UMKM, bantuan keuangan bagi UMKM, dan kebijakan struktural.³

Pertama, pemberlakuan protokol kesehatan ketat dalam menjalankan aktifitas ekonomi UMKM. seperti, Penggunaan masker pada saat beraktivitas diluar rumah , memakai sarung tangan, dan jaga jarak (social distancing) dapat dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus covid-19. Dan ini juga memerlukan kerjasama dan pengawasan dari instansi terkait yang berwenang terhadap pelaksanaan protokol covid-19 agar bisa berjalan dengan baik.⁴

² Moch Sulchan et al., “Analisis Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Stimulus Ekonomi Terhadap UMKM Terdampak Pandemi COVID-19,” *Jurnal*(2020).hlm.23

³ Moch Sulchan et al., “Analisis Strategi Dan Kebijakan”....Hlm.24

⁴ Moch Sulchan et al., “Analisis Strategi Dan Kebijakan”....Hlm.25

Kedua, pemerintah melakukan kebijakan struktural seperti, memberikan relaksasi kredit bagi pelaku UMKM sebagai bentuk bantuan penundaan pembayaran kredit atau keringanan pembayaran. Selain itu, dalam proses menyederhanakan administrasi untuk mendapatkan pinjaman pada musim pandemi saat ini. Hal ini mampu untuk dilaksanakan oleh para pelaku UMKM karena hal ini Bertujuan agar para pelaku UMKM khususnya para pekerja tetap mampu tetap mempertahankan tingkat konsumsi serta daya belinya dan mendukung berjalannya roda perekonomian nasional.⁵

Ketiga, Bantuan Kepada para pelaku UMKM. Pemerintah telah menyediakan beberapa anggaran sebesar kurang lebih 70,1 triliun untuk intensif sebagai dana perpajakan dan sebagai stimulus untuk perkreditan rakyat dari total anggaran yang sudah disediakan senilai 405,1 triliun guna untuk mengatasi pandemi covid 19 melalui APBN 2020. Pelaksanaan anggaran tersebut harus dilaksanakan dengan transparan jelas serta tepat sasaran agar eksistensi usaha mikro kecil menengah serta beberapa aktivitas perekonomian tetap mampu terjaga. Selain anggaran yang telah ditetapkan pemerintah juga menggandeng atau mendorong beberapa sektor-sektor diantaranya sektor perbankan baik itu bank milik negara maupun milik swasta Agar dapat memberikan bantuan berupa pinjaman untuk beberapa pelaku UMKM dengan sedikit memberikan kemudahan dalam proses peminjaman. Maka dari itu pemerintah mengajak beberapa bank agar tetap terhadap mekanisme peminjaman tapi juga harus memberikan kompensasi yang tidak memberatkan kepada beberapa peminjam yang peminjamnya tersebut adalah para pelaku

⁵ Moch Sulchan et al., “Analisis Strategi Dan Kebijakan”....Hlm.26

UMKM Hal ini bertujuan agar tidak ada penyalahgunaan kebijakan yang akan merugikan salah satu pihak nantinya.⁶

Keempat, untuk kebijakan pada jangka panjang tidak hanya pada saat pandemi covid-19. Kebijakan ini meliputi kebijakan-kebijakan jangka pendek bagi UMKM yakni pengenalan teknologi digital dan pelatihan bagi para pelaku dan pekerja UMKM serta kebijakan panjang bagi UMKM untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi untuk proses produksi, penggunaan media teknologi digital untuk mempromosikan produk UMKM, dan menemukan pasar potensial bagi produk yang dihasilkan. Dalam jangka pendek, perlu adanya pendampingan bagi para pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan media *e-commerce* (belanja daring) untuk menjual produk-produk mereka. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2018 baru 3,79 juta UMKM (atau sekitar 8 persen) yang memanfaatkan platform online untuk memasarkan produknya. Pemerintah dapat memulainya dengan membuat peta jalan pengembangan UMKM dalam menghadapi era Industri 4.0 mulai dari pelatihan ulang (*re-training*) para pekerja UMKM guna beradaptasi dengan penggunaan teknologi produksi baru dan teknologi digital, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan program internet masuk desa, pelibatan dunia akademisi dan usaha besar dalam pendampingan pengenalan dan penggunaan teknologi produksi dan media digital, serta menghidupkan kembali program kemitraan usaha besar dan UMKM. Kebijakan struktural ini dilakukan untuk mendukung penguatan UMKM sekaligus mendukung pengembangan UMKM di era Industri 4.0. Cara lain yang dapat dilakukan untuk membantu UMKM bertahan dalam situasi pandemi ini adalah dengan memanfaatkan dana

⁶ Moch Sulchan et al., “*Analisis Strategi Dan Kebijakan*”....Hlm.26

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dimiliki oleh perusahaan swasta dan badan usaha-badan usaha milik negara (BUMN).⁷

Penyebaran wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) makin meluas dan mendorong berbagai negara untuk melakukan *disease containment* melalui pembatasan aktivitas. Kebijakan pembatasan aktivitas yang bertujuan mengurangi tingkat penyebaran wabah telah berdampak negatif terhadap perekonomian global. Ekonomi dunia bahkan diprakirakan tumbuh negatif pada 2020. Kinerja manufaktur dan jasa melemah tajam, yang menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Otoritas fiskal dan moneter menempuh langkah kebijakan ultra akomodatif, dengan skala yang melampaui era krisis keuangan global. Di satu sisi, kebijakan tersebut dapat menahan pelemahan ekonomi lebih dalam dan menciptakan stabilitas pasar keuangan..⁸

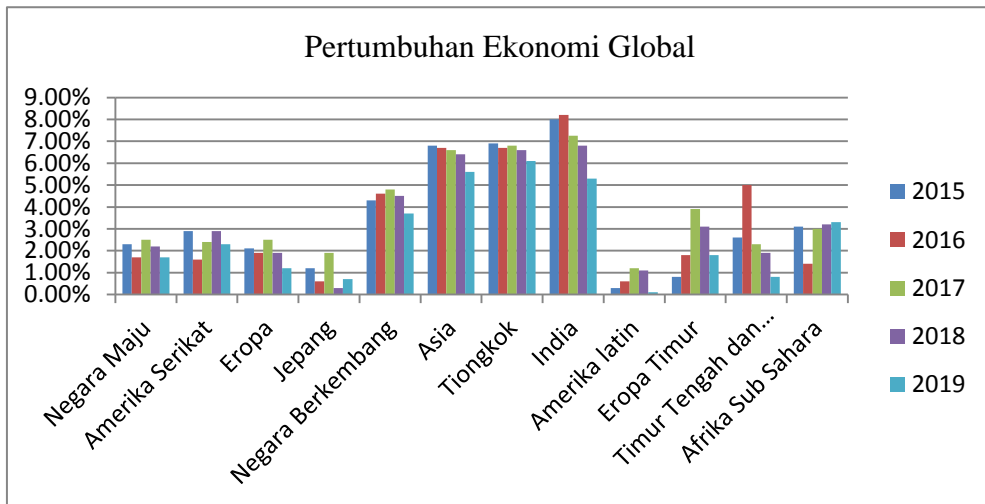
Pembuatan kebijakan publik agar dapat menyusun dan mengimplementasikan berbagai strategi jitu guna menjalankan perekonomian secara optimal di tengah pandemic. Serta bagaimana langkah pemulihan dan akselerasi ekonomi pasca pandemic. Para pembuatan kebijakan diharapkan dapat cermat dan berhati-hatiji dalam meramu bauran kebijakan di berbagai bidang, utamanya kesehatan dan ekonomi. Mengingat pada saat ini kesehatan merupakan aspek penting dalam ekonomi.⁹

⁷ Moch Sulchan et al., “Analisis Strategi Dan Kebijakan”Hlm.27

⁸ Masagung Suksmonohadi and Diah Indira, ‘Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19’, *Perkembangan Ekonomi Keuangan Dan Kerja Sama Internasional*, Edisi II (2020), 89–112.

⁹ Ahmad her firdaus, “Menata arsitektur ekonomi pasca pandemic”, (INDEF,2020),hlm. 1-4

Table 2.1: Pertumbuhan Ekonomi Global



B. Perkembangan Perekonomian Pasca Pandemi Covid-19

Jumlah kasus persebaran covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga membuat perekonomian di Indonesia belum stabil hingga saat ini. Dari bulan Maret hingga Agustus 2020 kasus terkonfirmasi covid-19 kian meningkat pemerintah telah menyiapkan strategi khusus dalam penanganan pandemi covid-19 dengan membuat vaksin yang dikembangkan peneliti Indonesia melalui Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19. Dari segi ekonomi, pemerintah memberikan stimulus berupa penundaan pembayaran pinjaman kredit, stimulus ekonomi bagi UMKM dll.

Belakangan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 yang turun 5,32 persen. Perekonomian Indonesia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) pada dasar harga berlaku triwulan II-2020 mencapai Rp 3.87,7 Triliun. Ekonomi Indonesia pada triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 mengalami penurunan (kontraksi) yang sangat signifikan yaitu menurun sebesar 5,31 persen. Hal ini disebabkan oleh turunnya produksi

hingga penurunan pada permintaan dan penawaran serta terhambatnya transportasi yang menjadi faktor lainnya.. Pada pengeluaran, terdapat komponen ekspor dan impor yang mengalami penurunan (kontraksi) pada triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019.¹⁰

Pada pengeluaran, terdapat komponen ekspor dan impor yang mengalami penurunan (kontraksi) pada triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019. Faktor yang sangat mempengaruhi yaitu transportasi yang terhambat akibat dampak pandemi covid-19 ini. Dimana produksi menurun serta terbatasnya transportasi internasional sehingga terjadi kelangkaan barang ekspor dan impor. Sementara dari sisi pengeluaran pada seluruh komponen terkontraksi, dengan terjadinya kontraksi yang tertinggi pada Komponen pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,44 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,55 persen dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,69 persen.

¹⁰ Moch Sulchan., *“Analisis Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Stimulus Ekonomi Terhadap UMKM Terdampak Pandemi COVID-19,”* *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, (2021), hlm. 89-90

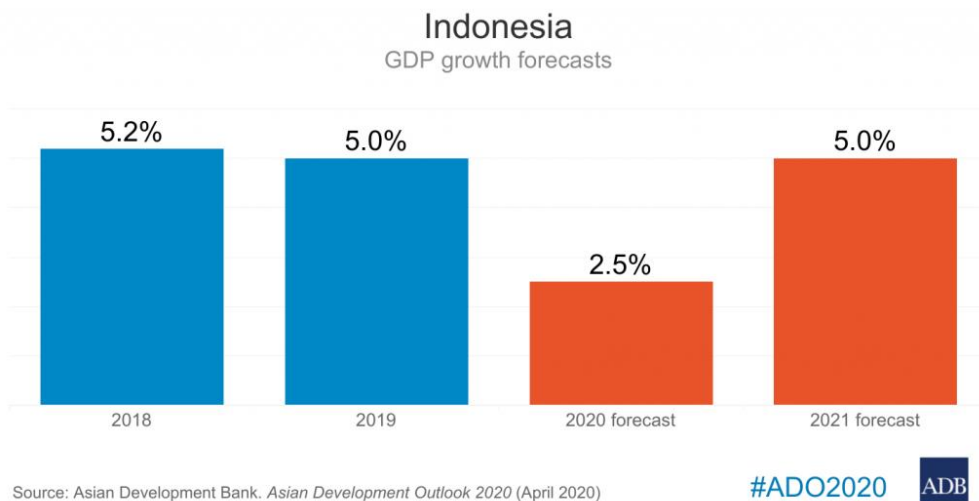


Table 2.2: Perkembangan Ekonomi Indonesia

Menurut laporan *Asian Development Bank* (ADB), Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 2,5% pada tahun 2020 di tengah pandemic penyakit virus corona yang baru (Covid-19), turun dari 5,0% pada tahun 2019.

Menurut *Asian Development Outlook* (ADO) 2020, Pandemi covid-19 bersamaan dengan penurunan harga komoditas dan gejolak pasar keuangan, akan berimplikasi buruk bagi perekonomian dunia dan Indonesia tahun ini, terlebih dengan jumlah mitra dagang utama Indonesia diperkirakan akan mengalami dampak negative pada perekonomian mereka. Permintaan dalam negeri diperkirakan akan melemah seiring dengan menurunnya sentiment bisnis dan konsumen. Namun, sejalan dengan pulihnya perekonomian dunia tahun depan, pertumbuhan Indonesia diperkirakan akan memperoleh momentum, dibantu dengan reformasi di bidang investasi yang dilakukan baru-baru ini.¹¹

¹¹ Moch Sulchan., “*Analisis Strategi Dan Kebijakan...*” hlm. 89-90

C. Program Bantuan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Program bantuan uang tunai bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) senilai 2,8 Triliun akan cair pada 17 Agustus 2020. Realisasi itu merupakan percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memberikan stimulus akibat dampak pandemi covid-19. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta Ketua Pelaksana pencegahan Covid-19 menjelaskan bahwa realokasi dana senilai 2,8 triliun yang akan di peroleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta besaran bantuan yang akan di peroleh pihak UMKM sebesar Rp. 2,4 juta kepada setiap pelaku UMKM. Berikut tentang stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) :

1. Bantuan Diberikan kepada 12 juta UMKM. Menteri Koperasi dan UKM mengatakan program produktif bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) program ini sifatnya bantuan tunai dan bukan termasuk pinjaman yang harus dikembalikan. Dan diberikan langsung kepada 12 juta pelaku UMKM.
2. Anggaran 22 Triliun. Bantuan produktif dari pemerintah dengan anggaran dana 22 triliun yang sifatnya adalah hibah bukan pinjaman atau kredit.
3. Cair pada 17 Agustus 2020. Menteri keuangan Sri Mulyani, mengatakan bahwa pemerintah melalui kementerian koperasi dan UMKM melakukan verifikasi data pelaku UMKM yang akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 2,4 juta.
4. Kriteria Penerima. Kriteria penerima adalah belum pernah atau sedang menerima pinjaman dari perbankan. Dan akan ditransfer sebesar Rp.2,4 juta.

5. 4,3 Juta Nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Dapat Bantuan. Direktur Utama Bank BRI Sunarso, mengatakan bahwa pihaknya telah mencatat terdapat 4,3 juta nasabah yang berpotensi menjadi calon penerima bantuan tersebut. Dengan data nasabah memiliki tabungan dibawah 2 juta rupiah.¹²

BLT untuk Pelaku Usaha Mikro
*BLT : Bantuan Langsung Tunai

Pelaku usaha yang tidak bisa mendapatkan bantuan

- Bukan pelaku UMKM
- Sedang menerima kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit lain dari perbankan.
- ASN, anggota TNI/Polri, atau Pegawai BUMN/BUMD
Bantuan ini juga tidak diperuntukkan bagi para pelaku usaha kecil yang merupakan ASN, anggota TNI/Polri, maupun pegawai BUMN/BUMD.
- Tidak mendapat rekomendasi dari lembaga pengusul

Persyaratan pelaku usaha yang bisa mendapatkan bantuan, sebagai berikut:

- Pelaku usaha merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
- Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampirannya
- Bukan ASN
- Bukan anggota TNI/Polri
- Bukan pegawai BUMN/BUMD

CATATAN:
Para pelaku dengan kriteria tersebut diidentifikasi dan diusulkan oleh Lembaga Pengusul, di antaranya adalah Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi dan Kabupaten/Kota, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, Kementerian/Lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang terdiri atas BUMN dan BLU. Kemudian, diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Keuangan dan OJK.

infopubdok kaltara | humas.kaltaraprov.go.id | pemprovkaltara | kaltaraprov | kaltaraprov

Gambar 2.1: Program bantuan pemerintah kepada UMKM

Pertama, bentuk support group komunitas UMKM sebagai wadah untuk mengungkapkan dan berbagai beban dengan pelaku usaha yang lain. Beri bantuan professional untuk membantu meringankan beban psikologis yang dialami terkait dengan permasalahan para pelaku usaha. Pelaku usaha dapat memulai dengan mengungkapkan apa yang sedang dirasakan dan yang membuat tidak nyaman dalam diri dalam situasi pandemic. Mengungkapkan

¹² Moch Sulchan., “Analisis Strategi Dan Kebijakan Pemerintah”,....Hlm.90

apa yang dirasakan adalah salah satu cara termudah untuk mengurangi beban dalam diri, karena sebenarnya sebagai makhluk sosial individu hanya butuh didengarkan.¹³

Kedua, memasukan pelaku UMKM sebagai penerima program bantuan pemerintah. Pemerintah juga perlu memberikan keringanan pembayaran pajak, merestrukturisasikan pembayaran pinjaman serta memperhatikan kredit macet yang mungkin dialami pelak UMKM. Sosialisasi kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) tentang program pemerintah juga bisa dilakukan terkait kebijakan pemberian kelonggaran pembayaran cicilan hutang ata kredit bagi UMKM agar tidak terjadi kredit macet yang mengakibatkan terhentinya bahkan matinya oprasional UMKM.¹⁴

Ketiga, melakukan pendataan yang lebih detil dan merata lalu menindaklanjutinya. Seperti yang telah dituliskan di atas, bahwa pemerintah daerah kota batam sudah melakukan pendataan hendaknya hal ini perlu ditunjang dengan konsistensi untuk mencari solusi bantuan selanjutnya demi keberlangsungan UMKM. Hingga saat ini belum ditemukan data terkait dengan keberlangsungan setelah proses pendataan tersebut.¹⁵

Keempat, membantu menyediakan dan menghimbau penggunaan protocol kesehatan ketat bagi pelaku UMKM untuk tetap menjalankan aktivitasnya. Kepatuhan penggunaan masker, sarung tangan dan jarak aman antar pekerja dapat dijadikan persyaratan bagi UMKM yang meminta ijin untuk tetap menjalankan aktivitasnya. Tentu saja hal ini perlu adanya kesadaran diri dari pelaku UMKM dan pengawasan yang kontinyu dari

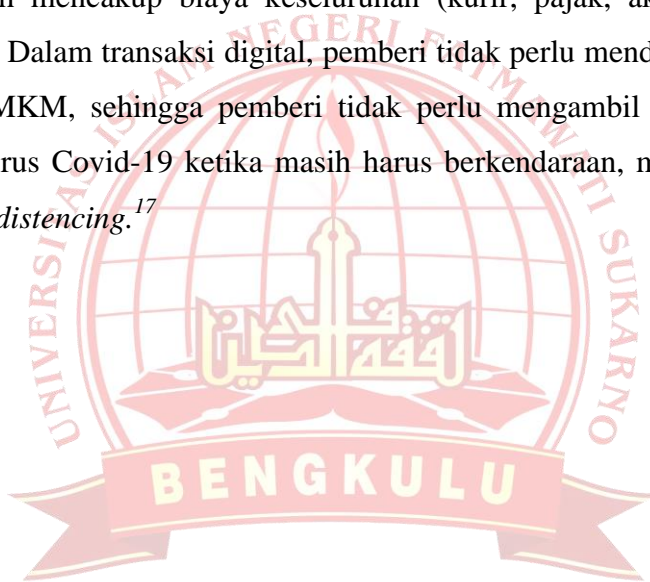
¹³ Sumaryono, “Sumbangan asosiasi psikologi industry pendampingan UMKM dan kewirausahaan”, (Literasi nusantara abadi, November 2021),hal.137

¹⁴ Sumaryono, “Sumbangan asosiasi psikologi”...hlm.137

¹⁵ Sumaryono, “Sumbangan asosiasi psikologi”...hlm.138

instansi yang berwanang agar protocol kesehatan ini dapat konsisten ditetapkan.¹⁶

Kelima, merancang strategi digitalisasi untuk membantu pelak UMKM bergeliat kembali. Bisnis berbasis digital dirasa mampu memberi keuntungan yang lebih besar baik dari sisi profit, keefektif efisienan proses penyelesaian pekerjaan maupun kesehatan pelaku UMKM, karena mereka harus beradaptasi dengan anjuran pemerintah untuk melakukan *social distancing*. Efisiensi biaya dan waktu menjadi factor utama melakukan transaksi online, karena sudah mencakup biaya keseluruhan (kurir, pajak, akomodasi dan sebagainya). Dalam transaksi digital, pemberi tidak perlu mendatangi tempat produksi UMKM, sehingga pemberi tidak perlu mengambil resiko terkait penularan virus Covid-19 ketika masih harus berkendara, mengantre dan tidak *social distencing*.¹⁷



¹⁶ Sumaryono, “*Sumbangan asosiasi psikologi*”...hlm.138

¹⁷ Sumaryono, “*Sumbangan asosiasi psikologi*”...hlm.139